



SUSTAINABILITY Report 2021

Center for Climate Risk and Opportunity Management
in Southeast Asia and Pacific



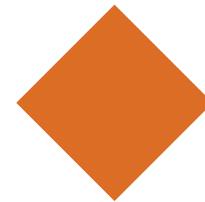
Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun laporan SDGs di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini bukan halangan tetapi tantangan bagi peneliti CCROM SEAP IPB untuk tetap produktif dalam mendukung perkembangan program Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs hadir dengan menyediakan indikator pembangunan berkelanjutan yang lebih terperinci melalui 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Rencana aksi global ini tentu perlu didukung oleh setiap stakeholder. Maka dalam setiap perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh IPB termasuk Pusat Studi di dalamnya berusaha semaksimal mungkin dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian SDGs tersebut dengan tetap memperhatikan tercapainya tujuan Pusat Studi CCROM sesuai indikator kinerja dan renstra IPB.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan SDGs untuk berbagai kegiatan CCROM SEAP IPB tahun 2021. Melalui laporan SDGs ini diharapkan semua kegiatan terkait SDGs dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang sehingga secara simultan akan dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan SDGs tersebut.



Indikator Kinerja Utama (IKU) Program NI-SCOPS (*National Initiative for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders*) di Indonesia

Category : SDGs in Research and Innovation

Centre for Climate Risk and Opportunity Management IPB University (CCROM-IPB) dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah dipilih sebagai National Research Partner (NRP) untuk merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan metode penilaianya, yang akan digunakan untuk mengevaluasi dampak dari proyek NI-SCOPS dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil kelapa sawit, meningkatkan penerapan praktik adaptif iklim dan penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit setelah menerapkan praktik berkelanjutan.

NI-SCOPS (National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders) adalah program yang didukung oleh IDH dan Solidaridad untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan adaptif. Tujuan dari program ini adalah untuk mengarusutamakan bahwa sektor kelapa sawit berperan dalam SDGs, sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan taraf hidup petani kecil dan pekerja di sektor kelapa sawit.

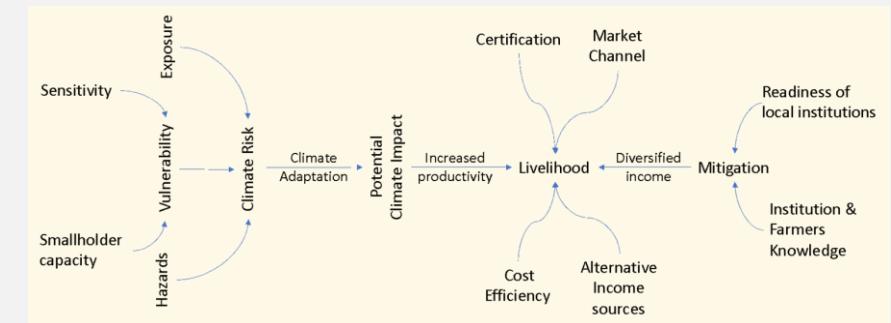


Program NI-SCOPS memiliki tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbeda, yaitu menangani mata pencarian, mitigasi dan adaptasi secara terintegrasi.

- IKU pertama adalah persentase petani yang mengalami peningkatan pendapatan
- IKU kedua adalah indeks yang menunjukkan tingkat penerapan praktik pertanian yang baik pada perkebunan kelapa sawit rakyat yang adaptif terhadap variabilitas dan perubahan iklim serta mengarah pada pertanian yang berketeraan iklim
- IKU ketiga, NI-SCOPS berupaya agar pekebun dapat melakukan mitigasi perubahan iklim dengan memfasilitasi penyelesaian status lahan pekebun yang berada di kawasan hutan dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari/agroforestri pekebun sawit rakyat.



Ketiga KPI tersebut saling berhubungan. Penerapan praktik pertanian yang adaptif iklim di perkebunan kelapa sawit (IKU-2) dapat menyebabkan pengurangan kerentanan sistem pertanian terhadap dampak variabilitas iklim (bahaya iklim) dan perubahan iklim sehingga meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selanjutnya, kapasitas pekebun diperkuat dengan meningkatkan modal sosial (kelembagaan), modal manusia, dan modal keuangan. Dengan peningkatan produktivitas, petani memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik yang akan meningkatkan taraf hidup (IKU-1). Penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit (IKU-3) oleh petani di kawasan hutan dapat memperbaiki kondisi lingkungan seperti peningkatan penyerapan karbon (IKU-3) serta meningkatkan ketahanan (IKU-2) petani karena sistem memberikan pendapatan yang lebih beragam dari berbagai sumber. Komoditas sistem agroforestri yang juga meningkatkan taraf hidup (IKU-1). Keterkaitan antara ketiga KPI tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.



Key Performance Indicator (KPI) for NI-SCOPS (National Initiative for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders) Program in Indonesia

Category : SDGs in Research and Innovation

Centre for Climate Risk and Opportunity Management of IPB University (CCROM-IPB) and the Indonesian Oil Palm Research Institute (IOPRI) have been selected as NRP to formulating the KPIs and the methods to assess them, which will be used to evaluate the impact of the NISCOPS project in improving the welfare of oil palm smallholders, increasing the adoption of the climate adaptive practices and the adoption of oil-palm based-agroforestry after implementing sustainable practices.

NI-SCOPS (National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders) is a program supported by IDH and Solidaridad that are realizing sustainable and adaptive oil palm plantations. The aim of this program is to mainstream that the palm oil sector plays a role in the SDGs, in line with the Paris Agreement's goal of reducing greenhouse gas emissions, as well as improving the living standards of smallholders and workers in the oil palm sector

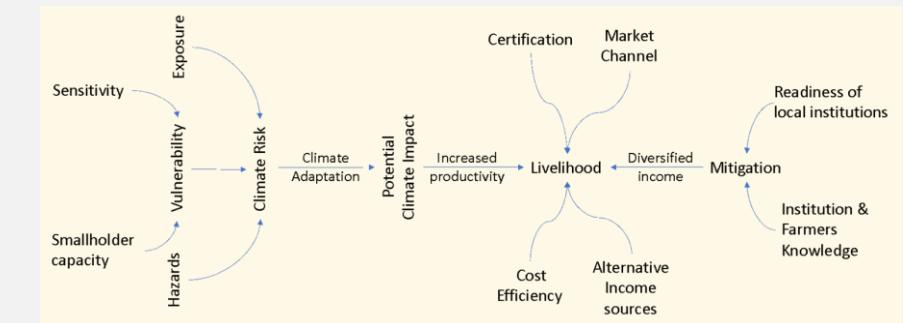


The NI-SCOPS program has three distinct Key Performance Indicators (KPIs), i.e. addressing livelihoods, mitigation and adaptation in an integrated way.

- The first KPI is the percentage of farmers that experienced an increase in income
- The scope of the second KPI, the KPI is an index that shows the level of implementation of the good agriculture practices of smallholder oil palm plantations adaptive to climate variability and change and lead to climate resilience farming
- The 3rd KPI, NISCOPS seeks to enable smallholders to mitigate climate change by facilitating the settlement of the land status for smallholder land located in forest areas and supporting the implementation of sustainable forest management/agroforestry of smallholder oil palm planters.



The three KPIs are interconnected. The implementation of climate adaptive practices in oil palm plantation (KPI2) can lead to reduction of vulnerability of the farming system to impact of climate variability (climate hazards) and climate change thereby increase the oil palm productivity. The capacity of the smallholders is strengthened by improving social capital (institutional), human capital, and financial capital. With the increase in productivity, the smallholders have opportunity to get better revenue that will improve the livelihood (KPI1). The adoption of oil palm-based agroforestry (KPI3) by smallholders in forest area can improve environmental conditions such as increase in carbon sequestration (KPI3) as well as increase the resilience (KPI2) of the smallholders as the system provide more diversified income from different commodities of the agroforestry system which also improve the livelihood (KPI1). The interconnection between the three KPIs can be seen in figure below.

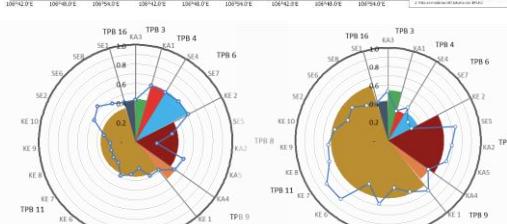
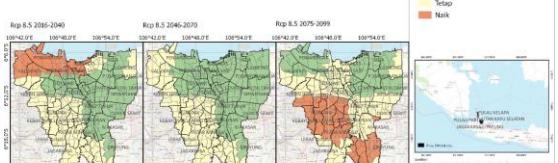
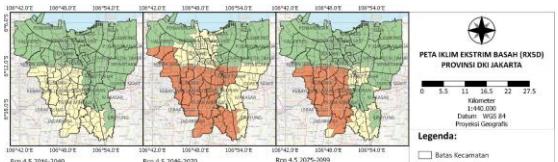


Pelaksanaan Adaptasi dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Iklim Provinsi DKI Jakarta

Category : Partnership

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah mengalami dampak perubahan iklim. Hujan dengan intensitas dan frekuensi tinggi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Peningkatan kenaikan muka air laut dan pasang air laut menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar di berbagai sektor di kemudian hari. Pelaksanaan aksi adaptasi merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptif dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim serta memperkuat ketahanan iklim Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan adaptasi yang berketeraan iklim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan iklim. Evaluasi terhadap aksi adaptasi yang direncanakan dan sudah dilaksanakan perlu dilakukan untuk dijadikan bahan perbaikan di masa depan. Tujuan utama kegiatan ini yaitu memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga mengkaji dampak perubahan iklim terhadap aspek sosial dan ekonomi di salah satu kelurahan di DKI Jakarta

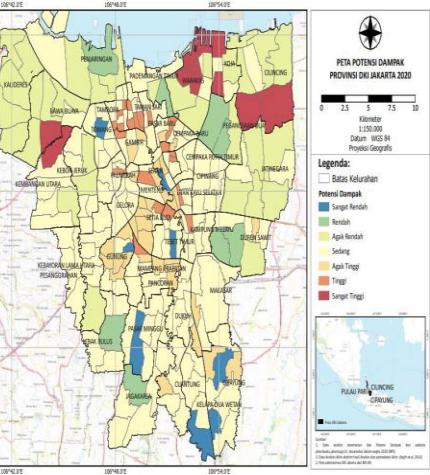


Analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu identifikasi program/kegiatan prioritas terkait adaptasi perubahan iklim setiap SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai berdasarkan keterkaitan serta besar kontribusinya dalam mengatasi masalah kerentanan perubahan iklim dan penanganan aspek pembangunan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) melalui metode *tagging*. Tahap kedua yaitu identifikasi faktor penyebab tingginya tingkat kerentanan, potensi dampak dan penentuan tingkat urgensi untuk penetapan lokasi yang membutuhkan program/kegiatan adaptasi utama. Tahap terakhir yaitu melakukan survei pada satu kelurahan terpilih untuk menilai dampak sosial-ekonomi perubahan iklim.



SKPD	SR	R	AR	S	AT	T	ST	TOTAL
Dinas Bina Marga	11			11	11	11	11	11
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	5	5	5	5	5	5	5	5
Dinas Kesehatan	10	1		23	23	23	23	23
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	14	7	7	14	14	14	14	14
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9			9	9	9	9	9
Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	11	11	11	11	11
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4			7	7	7	7	7
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6			6	6	6	6	6
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	23			23	23	23	23	24
Dinas Pendidikan	28			28	28	28	20	37
Dinas Perhubungan	16	2	2	16	16	16	16	16
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah	21	1	1	21	21	21	22	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	14	13	13	14	14	14	14	14
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	1	1	8	8	8	8	8
Dinas Sosial	26			26	26	26	26	26
Dinas Sumber Daya Air	18	18	18	18	18	18	18	18
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	15			15	15	15	15	15
Inspektorat	3			3	3	3	3	5
PERSENTASE	89%	22%	21%	95%	95%	92%	100%	

Notes: SR: Sangat Rendah (TPB 4, 6, 9); R: Rendah (TPB 11 & 16); AR: Agak Rendah (TPB 11); S: Sedang (TPB 3, 4, 6, 8, 9); AT: Agak Tinggi (TPB 3, 4, 6, 8, & 9); T: Tinggi (TPB 3, 4, 6, 8, & 9); ST: Sangat Tinggi (TPB 5, 6, 9 & 11)



Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 153 program/kegiatan yang berada pada prioritas sangat tinggi atau bisa dikatakan bahwa program/kegiatan ini berkontribusi lebih dari satu aspek pembangunan atau TPB dan juga berkontribusi positif dalam perbaikan tingkat potensi dampak. Sebagian besar wilayah DKI Jakarta berada pada kategori potensi dampak sedang yaitu mencapai 153 kelurahan dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta, sedangkan total kelurahan yang berada pada kategori potensi dampak sangat tinggi yaitu 9 kelurahan.

Kajian dampak perubahan iklim terhadap aspek sosial dan ekonomi dilakukan berdasarkan hasil survei di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara yang memiliki tingkat potensi dampak sangat tinggi, risiko iklim tinggi serta urgensi tinggi. Berdasarkan hasil analisis, wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap ekstrim basah yang berkaitan dengan banjir, ekstrim kering serta ekstrim panas. Secara umum, dampak sosial ekonomi akibat banjir yaitu kehilangan dan kerusakan aset seperti kerusakan bangunan dan isi rumah, kerusakan kendaraan, dan kerusakan kios. Selain itu banjir juga berdampak terhadap pekerjaan yaitu terganggunya produktivitas hingga tidak dapat bekerja ketika banjir yang berdampak pada kehilangan pendapatan dengan kisaran antara Rp 25.000/hari hingga lebih dari Rp 200.000/hari. Pada saat dan pasca kejadian banjir juga terjadi peningkatan penyakit seperti penyakit kulit, flu serta diare.

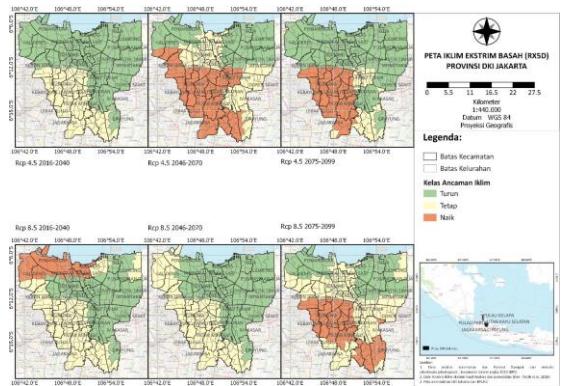
Bentuk upaya adaptasi yang cukup baik dilakukan di RW 05 tepatnya di RPTRA Rasela yang merupakan salah satu wilayah percontohan Program Kampung Iklim dengan kegiatan seperti hidroponik, aquaponik, pemanfaat sampah rumah tangga serta kotoran hewan dan tinja, dan penanaman sawah di kota.

Implementation of Adaptation Action to Strengthen DKI Jakarta Province Resiliency

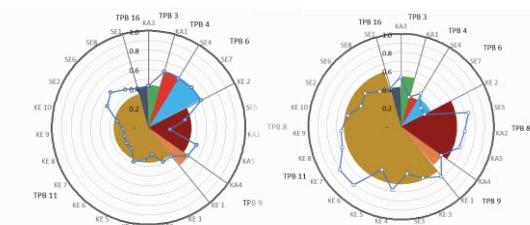
Category : Partnership

DKI Jakarta Province is one of the provinces in Indonesia that has been impacted by climate change. High intensity and frequency of rainfall are causing hydrometeorological disaster such as flood. Moreover, sea level rise and high tide are causing coastal flood in the northern coast of Jakarta. Therefore, climate change adaptation actions are needed to prevent higher loss and damage of various sectors in the future. The implementation of climate change adaptation actions is an effort to increase adaptive capacity and reduce climate change vulnerability as well as strengthen resiliency of DKI Jakarta Province.

In terms of the implementation of climate resiliency and adaptation, DKI Jakarta Province has developed Regional Climate Change Adaptation Plan. The evaluation to the adaptation actions that have been planned and implemented is needed as a lesson learned that can be improve in the future. The main purpose of this study is to monitor and evaluate the implementation of climate change adaptation actions in DKI Jakarta Province. This study also assess the socio-economic impact of climate change in one district of DKI Jakarta Province.

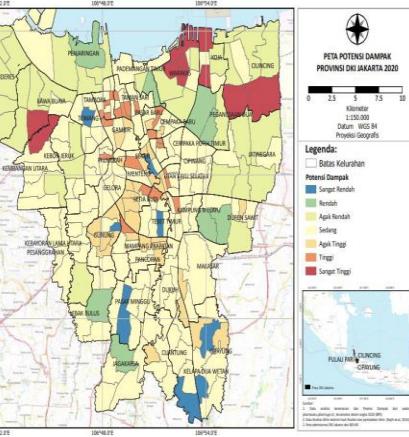


There are three steps of analysis that have been done to achieve the purpose of this study. First, identification of program/activity priority level related to climate change adaptation from every department of DKI Jakarta Province. The priority level is assessed based on the contribution of program/activity to solve climate change vulnerability and sustainable development goals (SDGs) through tagging method. Second, identification of causing factor of vulnerability and potential impact level, and determination of urgency level as a location that needs immediate implementation of adaptation program/activity. Third, survey in one chosen district to assess socio-economic impact of climate change.



SKPD	SR	R	AR	S	AT	T	ST	TOTAL
Dinas Bina Marga	11			11	11	11	11	11
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	5	5	5	5	5	5	5	5
Dinas Kesehatan	10	1		23	23	23	23	23
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	14	7	7	14	14	14	14	14
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9			9	9	9	9	9
Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	11	11	11	11	11
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Pendidikan	4			7	7	7	7	7
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6			6	6	6	6	6
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	23			23	23	23	23	24
Dinas Pendidikan	28			28	28	28	20	37
Dinas Perhubungan	16	2	2	16	16	16	16	16
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah	21	1	1	21	21	21	22	22
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	14	13	14	14	14	14	14	14
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	8	1	1	8	8	8	8	8
Dinas Sosial	26			26	26	26	26	26
Dinas Sumber Daya Air	18	18	18	18	18	18	18	18
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	15			15	15	15	15	15
Inspektorat	3			3	3	3	5	5
PERSENTASE	89%	22%	21%	95%	95%	95%	92%	100%

Note: SR: Sangat Rendah (TPB 4, 6, 9); R: Rendah (TPB 11 & 16); AR: Agak Rendah (TPB 11); S: Sedang (TPB 3, 4, 6, 8, 9); AT: Agak Tinggi (TPB 3, 4, 6, 8, & 9); T: Tinggi (TPB 3, 4, 6, 8, & 9); ST: Sangat Tinggi (TPB 3, 9, 8 & 11)



The analysis result shows that there are 153 program/activity with very high priority level which mean contribute to more than one development aspect or SDG as well as positively contribute to improvement of potential impact level. Most of the region in DKI Jakarta Province falls into moderate level of potential impact (153 sub districts out of 267 total sub districts in DKI Jakarta Province), while there are 9 sub districts with very high level of potential impact.

Assessment of climate change impact on social and economic aspect are done based on the survey result in Rawa Badak Selatan Sub District, Koja District, Jakarta Utara City that has very high potential impact, high climate risk, and high urgency level. Based on the analysis result, Rawa Badak Selatan Sub District region has high level of risk to wet extreme which related to flood, dry extreme and extreme heat. In general, socio-economic impact of flood is loss and damage of asset such as damaged building, house, vehicles, and kiosk. Moreover, flood also affected work productivity and ability to go to work. Loss of wage during the flood ranged from Rp 25.000/day to more than Rp 200.00/day. Disease that emerge during and after the flood event are skin disease, flu, and diarrhea.

Adaptation actions that have been implemented quite well is located in RW 05 specifically RPTRA Rasela which is one of the location of Climate Village Program (Proklim) with activity such as hydroponic, aquaponic, biogas, and urban rice field.





Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim

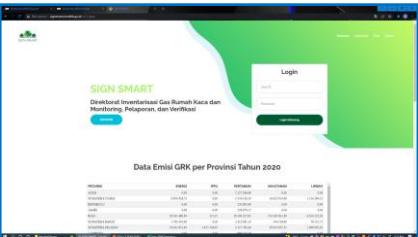
(Pekanbaru, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Cirebon, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Gorontalo, and Ternate)

3

Category : SDGs in Community Engagement

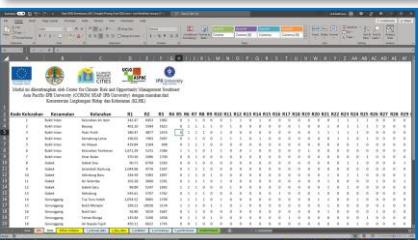
Kegiatan penelitian ini bertujuan memberikan peningkatan kapasitas untuk membantu Tim Pokja dalam penyusunan Rencana Aksi Iklim melalui Training dan Pendampingan. Peningkatan kapasitas ini akan menggunakan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) dan Sign Smart (Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, Transparan) sebagai alat yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK.

Waktu Pelaksanaan, kegiatan pelatihan dilakukan selama **13 bulan** dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 (pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sempat berhenti selama 3 bulan) dan proses pelatihan dilakukan **secara virtual**.



Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah pemerintah daerah mampu dalam melakukan penyusunan Rencana Aksi Iklim untuk dijadikan bagian evaluasi serta dasar dari pelaksanaan pembangunan yang sudah dan yang akan direncakan.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini, yaitu (1) Modul pelatihan adaptasi dan mitigasi iklim, (2) Template dokumen rencana aksi iklim, (3) Penyampaian program pelatihan dan menjaga kualitas kegiatan dan (4) Laporan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis, serta evaluasi dan masukan lebih lanjut serta rekomendasi perbaikan.



ASPIRASIku

Nasional | Kabar Daerah | Internasional | Ekonomi Bisnis | Pendidikan | Gaya Hidup | Olahraga

Kabar Daerah

Siap Hadapi Perubahan Iklim! Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Bandar Lampung di Mulai

Agustinus Leontinus - Selasa, 7 September 2021 | 12:30 WIB

Ditulis oleh Maria Serenade

KATEGORI: DITAYANGKAN: SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 14:20

PELATIHAN PENYUSUNAN RAI KOTA BANDAR LAMPUNG RESMI DIMULAI

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG AP) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, Selasa (7/9). Pelatihan awal terkait Basis Ilmiah, Kerentanan dan Risiko Perubahan iklim akan berlangsung 7-10 September dengan melibatkan seluruh anggota Tim Kelompok Kerja Perubahan iklim Kota Bandar Lampung.

Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi iklim (RAI) adalah rangkaian kegiatan pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Kelompok Kerja (Pokja) di seputar kota percontohan CRIC. RAI telah dilakukan secara virtual dan secara hybrid di kota-kota percontohan CRIC.

Sumber: [Aspirasiku](#)



RENCANA AKSI IKLIM: SEPULUH KOTA MERESPOON DARURAT IKLIM

Seri pelatihan Penyusunan Rencana Aksi iklim (RAI) yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi dimulai di Kota Gorontalo, Senin (9/8). Bergulirnya serangkaian pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini sekaligus mendemonstrasikan komitmen sepuluh kota untuk merespon darurat iklim.

Manager Proyek CRIC Aniesha Delina Sari yang membuka pelatihan mitigasi inventarisasi Emisi GRK secara virtual mengatakan bahwa pelatihan ini adalah titik mulai yang penting bagi kota percontohan CRIC, dan juga bagi upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. "Sejak Agustus 2021 hingga Juni 2022, Tim Kelompok Kerja CRIC akan berproses bersama untuk menjadi katalis perubahan di kotanya masing-masing," ujarnya.

Rencana Aksi iklim Gorontalo

Pelatihan Penyusunan RAI adalah rangkaian pelatihan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditujukan untuk anggota Tim Kelompok Kerja CRIC di sepuluh kota. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta CCROM-Institut Pertanian Bogor dan akan diselenggarakan dalam dua fase sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Pelatihan mitigasi terdiri dari tiga pelatihan utama yakni inventarisasi emisi gas rumah kaca, penentuan baseline emisi dan penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Daerah. Adapun pelatihan adaptasi terdiri dari basis ilmiah perubahan iklim, kerentanan dan risiko iklim serta penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Daerah.



Climate Action Plan Development Training

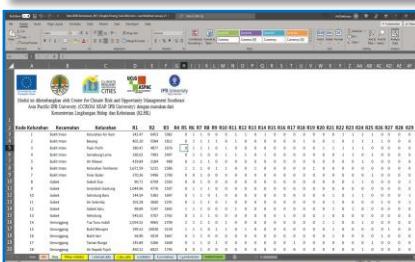
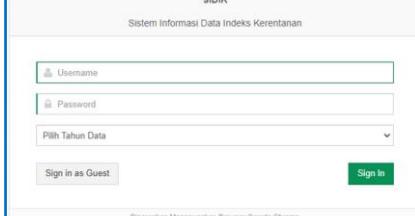
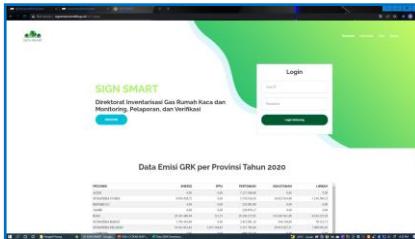
(Pekanbaru, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Cirebon, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Gorontalo, and Ternate)

3

Category : SDGs in Community Engagement

This research activity aims to provide capacity building to assist the local government in preparing the Climate Action Plan through Training and Mentoring. This capacity increase will use SIDIK (*Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan*) and Sign Smart (*Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, Transparan*) as tools issued by the Ministry of Environment and Forestry.

Implementation time, Training activities are carried out for 13 months from August 2021 to February 2023 (the implementation of training and mentoring had stopped for 3 months in October 2021 to January 2022) and the training process was carried out virtually.



The advantage of this research activity is that local governments be able to carry out the preparation of Climate Action Plans to be used as part of the evaluation and the basis of the implementation of development that has been and will be planned.

The outputs are expected from this research activity, namely (1) Climate adaptation and mitigation training modules, (2) Template of climate action plan document, (3) Delivery of the training programme and maintaining the quality of activities, and (4) Report activity on training implementation and technical assistance, as well as evaluation and further input and recommendations for improvement.



PELATIHAN PENYUSUNAN RAI KOTA BANDAR LAMPUNG RESMI DIMULAI
United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Bandar Lampung, Selasa (7/9). Pelatihan awal terkait Basis Ilmiah, Kerentanan dan Risiko Perubahan iklim akan berlangsung 7-10 September dengan melibatkan seluruh anggota Tim Kelompok Kerja Perubahan iklim Kota Bandar Lampung.

Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi iklim (RAI) adalah serangkaian kegiatan pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Kelompok Kerja (PKJ) di sepuluh kota percontohan CRIC. RAI telah dilakukan secara remzi mulai ketegan kick-off 31 Juni 2021 dan kemudian dilaksanakan secara virtual dan secara virtual dan hybrid di kota-kota percontohan CRIC.



RENCANA AKSI IKLIM: SEPULUH KOTA MERESPOON DARURAT IKLIM

Seri pelatihan Penyusunan Rencana Aksi iklim (RAI) yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi dimulai di Kota Gorontalo, Sulawesi Utara (9/8). Bergulirnya serangkaian pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini sekaligus mendemonstrasikan komitmen sepuluh kota untuk merespon darurat iklim.

Manager Proyek CRIC Aniesha Delina Sari yang membuka pelatihan mitigasi inventarisasi Emisi GRK secara virtual mengatakan bahwa pelatihan ini adalah titik mula yang penting bagi kota percontohan CRIC, dan juga bagi upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. "Sejak Agustus 2021 hingga Juni 2022, Tim Kelompok Kerja CRIC akan berpores bersama untuk menjadi katalis perubahan di kotanya masing-masing," ujarnya.



Rencana Aksi Iklim Gorontalo

Pelatihan Penyusunan RAI adalah serangkaian pelatihan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditujukan untuk anggota Tim Kelompok Kerja CRIC di sepuluh kota. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta CCROM-Institut Pertanian Bogor dan dilaksanakan dalam dua fase sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Pelatihan mitigasi terdiri dari tiga pelatihan yakni inventarisasi emisi gas rumah kaca, penentuan baselin emisi dan penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Daerah. Adapun pelatihan adaptasi terdiri dari basis ilmiah perubahan iklim, kerentanan dan risiko iklim serta penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Daerah.



Mengembangkan Instrumen Strategis Terpadu untuk Mendukung Integrasi NDC ke Dalam Rencana dan Kebijakan Pembangunan

Category : SDGs in Research and Innovation

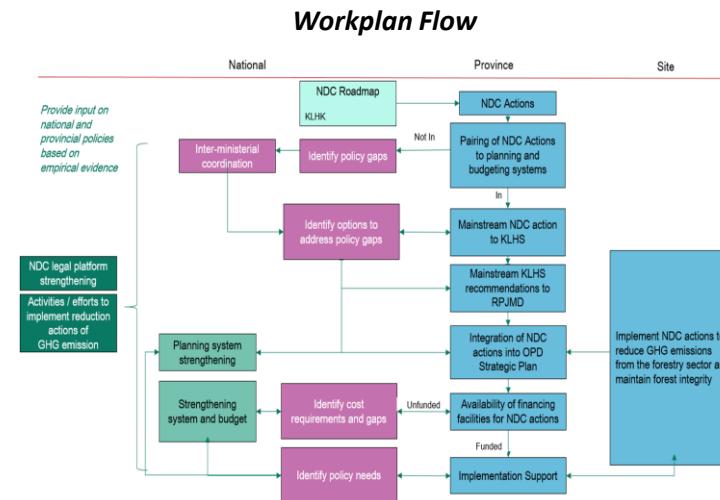
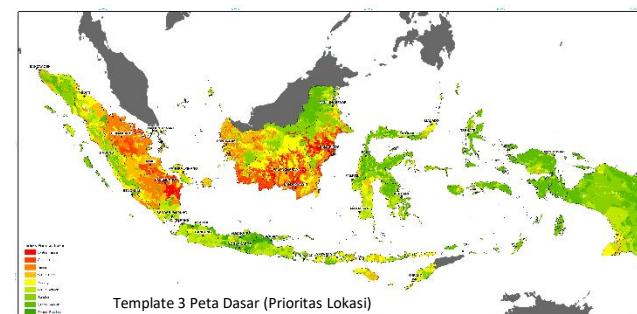
Pemerintah Indonesia sebagai pihak UNFCCC telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16/2016. Untuk menjalankan amanat regulasi tersebut, Indonesia telah menyampaikan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam pengelolaan perubahan iklim melalui First NDC's (Nationally Determined Contribution) pada November 2016. Komitmen ini merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap masalah pemanasan global dan iklim. Target penurunan emisi GRK akan dicapai dari sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, serta pertanian. Untuk dapat mengimplementasikan unsur-unsur mitigasi NDC, berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan upaya Indonesia untuk mencapai target NDC berjalan dengan baik, salah satunya adalah komponen perumusan kebijakan dan perencanaan hijau. Mendukung pemerintah Indonesia untuk mengarusutamakan NDC ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan, serta berinvestasi dalam pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut, melalui penguatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan, diarahkan pada tiga komponen. Pertama, kebijakan dan perencanaan hijau yang efektif yang mendorong investasi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut, terutama di provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas. Kedua, mobilisasi pendanaan untuk pengembangan kerangka investasi pengurangan emisi dan jalur proyek. Ketiga, peningkatan pengetahuan dan kapasitas pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, rencana, dan investasi dalam strategi penurunan emisi GRK.

Dalam rangka pencapaian 3 komponen tersebut CCROM SEAP IPB bekerja sama dengan Global Green Growth Institute melaksanakan kegiatan mengembangkan instrumen strategis terpadu untuk mendukung integrasi NDC ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang dimulai september 2021 sampai september 2022. Tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan instrumen strategis terpadu untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengarusutamakan NDC ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan, dan untuk berinvestasi dalam pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan lahan gambut melalui penguatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan. Instrumen strategis yang terintegrasi untuk mengarusutamakan NDC ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme koordinasi di dalam dan lintas sektor yang terlibat dalam pelaksanaan aksi NDC.



Manfaat utama dari kegiatan ini adalah kebijakan dan rencana yang efektif untuk mendorong pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut serta pencegahan hilangnya hutan, terutama di provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas. Keluaran utama dari kegiatan ini adalah (I) Laporan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang dirancang untuk mengadopsi pengurangan emisi GRK, (II) Konsolidasi Kebijakan yang memungkinkan masuknya investasi untuk pelaksanaan penurunan emisi GRK, (III) Laporan tinjauan kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan pengurangan emisi GRK.

Untuk tahun 2021, lokasi kegiatan dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dengan menghasilkan tiga keluaran kegiatan dari 15 total kegiatan yang akan dilaksanakan. Ke tiga keluaran tersebut adalah Template 3 peta dasar integrasi perencanaan program berbasis spasial, Pedoman atau SOP penggunaan dan pemanfaatan integrasi perencanaan program berbasis spasial, dan Dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3.



INDONESIA

Third Biennial Update Report

Under the United Nations Framework Convention on Climate Change



REPUBLIC OF INDONESIA

2021

Keluaran Kegiatan Tahun 2021



Developing an Integrated Strategic Instrument for Supporting The Integration of NDCs into Development Plans and Policies

4

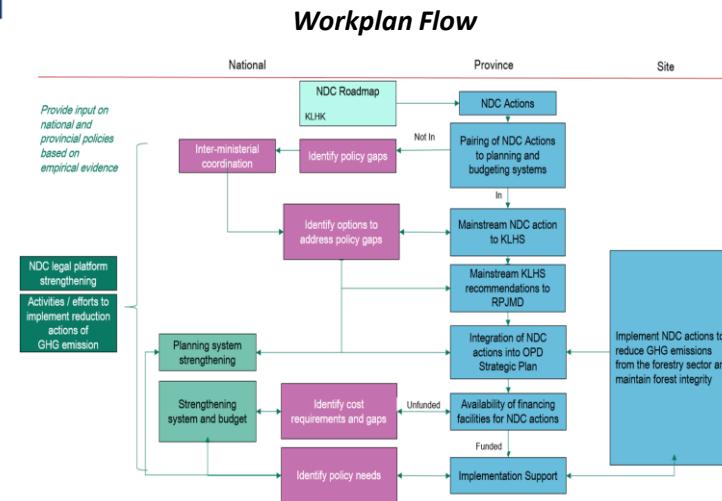
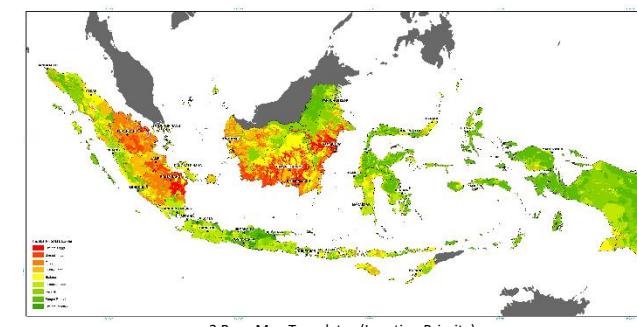
Category : SDGs in Research and Innovation

The Government of Indonesia as a party to the UNFCCC has ratified the Paris Agreement through Law No. 16/2016. To carry out the regulatory mandate, Indonesia has submitted a national commitment to contribute to climate change management through the First NDC's (Nationally Determined Contribution) in November 2016. This commitment is a manifestation of Indonesia's concern for global warming and climate issues. GHG emission reduction targets will be achieved from the forestry, energy, waste, industrial processes, and product use sectors, as well as agriculture. To be able to implement the elements of NDC mitigation, various policies, and regulations have been issued by the Government. The implementation of Indonesia's efforts to achieve the NDC target is going well, one of which is the component of policy formulation and green planning. Supporting the Indonesian government to mainstream NDCs into development plans, and policies, as well as investing in reducing emissions from deforestation, forest, and peatland degradation, through strengthening government and stakeholder capacity, is directed at three components. First, effective green policies and planning that encourage investment to reduce deforestation and degradation of forests and peatlands, especially in provinces that have large forest areas. Second, mobilize funding for the development of an emission reduction investment framework and project pathway. Third, increasing the government's knowledge and capacity to make and implement policies, plans, and investments in GHG emission reduction strategies.

In order to achieve these 3 components, CCROM SEAP IPB in collaboration with the Global Green Growth Institute carried out activities to develop integrated strategic instruments to support the integration of NDCs into the Indonesian government's development plans and policies starting from September 2021 to September 2022. The objective of this activity is to prepare an integrated strategic instrument to support the Indonesian government in mainstreaming NDCs into development plans and policies, and to invest in reducing emissions from deforestation, forest degradation, and peatlands through strengthening government and stakeholder capacities. An integrated strategic instrument for mainstreaming NDCs into development plans and policies is expected to facilitate coordination mechanisms within and across sectors involved in implementing NDC actions.

The main benefit of this activity is effective policies and plans to encourage reduced deforestation and forest and peatland degradation and prevent forest loss, especially in provinces that have large forest areas. The main outputs of this activity are (I) Subnational Development Planning and Budgeting Reports designed to adopt GHG emission reductions, (II) Consolidation of Policies that allow the entry of investment for the implementation of GHG emission reductions has been supported, (III) Policy review reports that enable the implementation of GHG emission reductions have been supported.

For 2021, the location of the activities will be carried out at the national and regional levels, namely in the Provinces of Central Kalimantan and South Kalimantan. By producing three activity outputs from the total 15 activities to be carried out. The three outputs are Templates of 3 base maps integration of spatial-based program planning, Guidelines and/or SOPs for the use and utilization of the integration of spatial-based program planning, and Document of 3rd BUR and submission.



INDONESIA

Third Biennial Update Report

Under the United Nations Framework Convention on Climate Change



REPUBLIC OF INDONESIA
2021

2021 Activity Deliverables



5

Penyusunan dan pelaporan *Biennial Update Report* Indonesia ke-3 kepada *United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*

Category : Partnership

Mengacu kepada Keputusan 2/CP17 Ayat 41 hasil pertemuan *Conference of Parties* yang ke-17, negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris dan termasuk kedalam kategori *non-Annex 1* harus menyampaikan dokumen *Biennial Update Report (BUR)*, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tingkat dukungan yang diterima. Dokumen *Biennial Update Report* berisi perbaruan informasi inventarisasi gas rumah kaca, informasi aksi mitigasi dan dampaknya, dukungan yang dibutuhkan dan diterima, serta proses pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (*Monitoring, Reporting, and Verification* atau MRV).

Dalam kasus Indonesia, sebagai salah satu negara yang melaksanakan kegiatan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (REDD)+*, dokumen *Biennial Update Report* juga melengkapi lampiran teknis untuk kegiatan REDD+.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen BUR yang pertama dan kedua pada tahun 2016 dan 2018. Persiapan dokumen BUR yang ke-3 dimulai pada tahun 2020 melalui serangkaian acara koordinasi kementerian dan institusi terkait, ilmuwan, dan ahli, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* yang menyatakan visi Indonesia untuk mencapai emisi bersih nol pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, dokumen BUR yang ke-3 berperan untuk menyampaikan informasi emisi historis yang transparan, akurat, sebanding, menyeluruh, dan konsisten, dalam tujuan mengetahui perkembangan komitmen aksi mitigasi Indonesia.

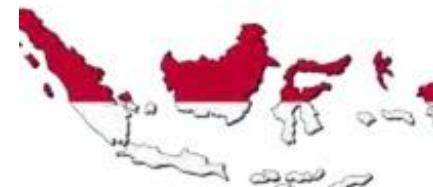
Dokumen BUR yang ke-3 telah diserahkan kepada UNFCCC pada tanggal 20 Desember 2021 (<https://unfccc.int/BURs>).



NDONESIA

Third Biennial Update Repo

for the United Nations Framework Convention on



EPUBLIC OF INDONESIA

021

Formulation of Indonesia's 3rd Biennial Update Report to the United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Category : Partnership

Referring to Decision 2/CP17 Para 41 of the 17th Conference of Parties, non-Annex 1 Parties who ratified Paris Agreement should submit their Biennial Update Report (BUR), consistent with their capabilities and level of support provided. Biennial Update Report containing the updates of national greenhouse gas inventories, information on mitigation actions and their effects, needs and support received, and monitoring, reporting, and verification (MRV) process.

In Indonesia's case, as part of Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (REDD+) implementers, the Biennial Update Report also includes a technical annex for REDD+ activity.

The government of Indonesia has submitted its First and Second BUR in 2016 and 2018, respectively. Preparation of the Third BUR initiated in 2020 through a series of coordination of related ministries and institutions, scientists, and experts, as coordinated by the Ministry of Environment and Forestry.

Following Indonesia's submission of Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience in July 2021, which stated the vision to reach Net Zero Emission (NZE) in 2060 or sooner, the third BUR document delivers a transparent, accurate, comparable, complete, and consistent report to track the pathway of Indonesia's historical emission.

Third BUR has been submitted to the UNFCCC on December 20, 2021 (<https://unfccc.int/BURs>).



INDONESIA

Third Biennial Update Report

Under the United Nations Framework Convention on Climate Change



REPUBLIC OF INDONESIA

2021